

PENGARUH KONTESTASI POLITIK DESA TERHADAP KONFLIK AHMADIYAH DI GEGERUNG-LOMBOK BARAT

Mohamad Baihaqi

Mahasiswa Magister Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
mohamadbaihaqi91@gmail.com

Abstrak

Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Gegerung-Lombok terjadi pada 2005-2006 dan 2010. Pada tahun itu kontestasi pemilihan kepala desa bakal dilaksanakan. Beberapa bulan menjelang pemilihan kepala desa, salah satu tokoh agama kerap menyampaikan ceramah yang bernada provokatif. Belakangan diketahui bahwa tokoh agama tersebut berafiliasi dengan salah satu kontestan calon kepala desa. Penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Gegerung terjadi secara instrumental yang disebabkan oleh adanya kepentingan politik tokoh agama dan salah satu kandidat dalam pemilihan kepala desa setempat. Sekaligus menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah tidak hanya disebabkan oleh faktor perbedaan keyakinan antara Jemaat Ahmadiyah dan warga Desa Gegerung-Lombok Barat. Bukan pula terjadi semata karena adanya fatwa MUI dan peraturan diskriminatif bupati Lombok Barat. Keduanya tidak berhubungan secara langsung sebagai pemicu konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Desa Gegerung justru terjadi karena adanya campur tangan politisi dan tokoh agama di yang menjadikan perbedaan sebagai komoditas politik.

Kata kunci: Ahmadiyah, Politik Desa, Konflik dan Kekerasan

Abstract

Attacks against the Ahmadiyah congregation in Gegerung-Lombok took place in 2005-2006 and 2010. In that year, contestation for the village head election would be held. A few months before the village head election, one of the religious

leaders often delivered provocative lectures. It was later discovered that this religious figure was affiliated with one of the village head candidate contestants. This study reveals that the conflict and violence against the Ahmadiyya Jama'at in Gegerung occurred instrumentally due to religious leaders' political interests and one of the candidates in the election for the local village head. At the same time, it shows that the conflict and violence against the Ahmadiyya Jama'at are not only caused by factors of differences in beliefs between the Ahmadiyya Jama'at and residents of Gegerung Village-West Lombok. Nor did it just happen because of the MUI fatwa and the West Lombok regent's discriminatory regulations. Both are not directly related as triggers of conflict and violence. The conflict and violence against Ahmadiyah in Gegerung Village actually occurred because of the interference of politicians and religious leaders who made differences as a political commodity.

Keywords: Ahmadiyah, Village Politics, Conflict and Violence

A. Pendahuluan

Ahmadiyah bukanlah gerakan keagamaan baru di Indonesia. Bahkan sejak 1918, kabar mengenai Ahmadiyah sudah terdengar, sebelum akhirnya diperkenalkan secara langsung pada 1920.¹ Sedangkan di Lombok, Jemaat Ahmadiyah diperkirakan masuk sejak 1957 dibawa oleh Jafar Ahmad setelah belajar di Surabaya.² Perjalanan Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan mengalami dinamika di setiap zamannya. Perdebatan dan dialog mengenai gerakan ini sejak pra kemerdekaan sudah berlangsung. Meski belakangan, perdebatan dan dialog semacam itu nyaris ditutup. Hanya konflik dan kekerasan yang terus mengemuka.

Di Indonesia, konflik-konflik Ahmadiyah merebak dan peristiwa-peristiwa tersebut kerap kali diabaikan. Negara acapkali tak hadir dalam menjamin kebebasan beragama ketika kelompok mayoritas melakukan kekerasan terhadap minoritas. Kepolisian tak sepenuhnya mampu mengamankan kekerasan di pelbagai tempat. Di

¹Iskandar Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah, (Yogyakarta: LKiS, 2002), Hlm. 171

²Nurhikmah, Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing: Narasi Identitas dalam Kekerasan JAI di Lombok, (Yogyakarta: Tesis Universitas Sanata DHarma, 2013), hlm. 47

Lombok sendiri kekerasan terhadap Ahmadiyah merebak di seluruh kabupaten, kecuali di Kota Mataram.

Setelah mengalami kekerasan berturut-turut, Jemaat Ahmadiyah meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke Desa Gegerung. Namun konflik dan kekerasan pun terjadi di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Hingga saat ini puluhan warga Ahmadiyah terpaksa mengungsi di Asrama Transito setelah mengalami pengusiran dari rumahnya di Desa Sambi Elen, Kabupaten Lombok Utara dan Desa Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Sebelum kemudian diusir dari Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Lombok Barat.

Asrama tempat Jemaat Ahmadiyah ditampung terletak di kelurahan Majeluk, Kota Mataram. Mereka hidup berdesak-desakkan dalam sebuah bangunan sempit bekas kantor transmigrasi. Namun setelah 15 tahun warga tinggal, secara bertahap beberapa warga Ahmadiyah berhasil menyewa dan membeli rumah di sekitar Kota Mataram. Penghuni di Asrama Transito juga menurun. Awalnya dihuni oleh 62 Kepala Keluarga (KK), kini mereka tinggal bersama 33 KK.³

Ketika pertama kali diungsikan, warga Ahmadiyah merasa kesulitan memertahankan hidupnya. Akhirnya beberapa warga menjual beberapa sisa aset berupa tanah di Lombok Timur. Hasil penjualan lahan tersebut, dibagikan secara merata kepada seluruh warga yang tinggal di asrama transito. Akan tetapi hasil penjualan tanah tersebut hanya bertahan beberapa bulan.⁴

Dari kompleksitas persoalan di atas menyebabkan sejumlah akademisi, NGO dan lembaga-lembaga sosial tingkat lokal maupun nasional turut melakukan kajian dan membantu melakukan advokasi. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah berupaya melihat pola dan pemicu konflik dari pelbagai perspektif.⁵ Penelitian-penelitian tersebut

³ Wawancara, Ahmad Saleh, Warga Ahmadiyah Lombok pada Sabtu, 14 Maret 2020. Pukul 15.00 WITA

⁴ Wawancara, Ahmad Saleh, Warga Ahmadiyah Lombok pada Sabtu, 14 Maret 2020. Pukul 15.00 WITA

⁵ Sejumlah peneliti dari dalam dan luar negeri berupaya menghubungkan antara konflik dan kebijakan negara. Salah satunya lewat

dominan menjelaskan relasi Jemaat Ahmadiyah dengan warga setempat, pemerintah daerah dan kebijakan negara di level makro.⁶ Namun luput mengengok dan menelaah bagaimana mekanisme birokrasi di tingkat terkecil di desa sampai di dusun bekerja.

Sementara itu, dalam tulisan ini akan diamati lebih jauh apakah terdapat hubungan antara situasi politik Desa Gegerung dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah? Apakah hubungan tersebut memiliki korelasi dengan konflik dan kekerasan? Mengingat konflik dan kekerasan terjadi berturut-turut dan menyebabkan Jemaat Ahmadiyah mengalami luka-luka dan kerugian materil lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif disajikan secara analisi-deskriptif. Penggalan data dilakukan lewat observasi dan wawancara dengan pelbagai aktor politik dan warga di Desa Gegerung dan Jemaat Ahmadiyah sendiri. Penggalan data dari pelbagai sumber dilakukan semenjak tahun 2018-2019 yang dilaksanakan di Asrama Transito Majeluk Mataram dan di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar

Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional pada VI 2005 dengan SK nomer 11/MUNAS/ MUI/15/2015 menetapkan dan menegaskan hasil MUNAS 1980 bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan dan orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. Belakangan muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung nomer 3 tahun 2008 terkait peringatan pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah.

⁶ Dalam penelitian ini antara lain menggunakan referensi dari peneliti sebelumnya seperti Abdul Jamil Wahab dan Fakhruddin, “Menakar Efektivitas SKB tentang Ahmadiyah dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur”, Jurnal Harmoni vol. 17, Nomer 2, hlm. 457. Abdul Gaffar, “Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB”, Jurnal Sosiologi Islam, vol. 3no. 2 Oktober 2013. Nurhikmah, “Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing: Narasi Identitas dalam Kekerasan JAI di Lombok”, Yogyakarta: Tesis Universitas Sanata DHarma, 2013). “Persepsi Ancaman Sebagai Prediktor Intoleransi Politik Terhadap Jemaat Ahmadiyah dan Jamaah NW Pancor Lombok Timur”, Makalah Prosiding Seminar Nasional Psikologi Indigenius Indonesia, 2018 (tidak diterbitkan). Ayub Mursalin, Bakhtiar Hasan, “Konflik Komunal Mengatasmakan Agama di Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media 2005-2011”, Jurnal Kontekstualita, Vol. 26, No.1, 2011

Kabupaten Lombok Barat. Selain itu sumber pustaka yang digunakan berasal dari sejumlah hasil penelitian sebelumnya baik dari buku maupun artikel di jurnal.

B. Instrumentalisasi Konflik: Bingkai Teori

Dalam instrumentalisasi konflik, sejumlah elit memiliki peran di tengah masyarakat untuk memainkan sentimen agama. Identitas digugat lalu dimanfaatkan untuk membangkitkan sentimen kelompok tertentu. Lewat strategi semacam itu, elit agama dan politik melakukan mobilisasi yang mensyaratkan perpaduan antara identitas kelompok dengan klaim-klaim tertentu terhadap salah satu kelompok minoritas.

Mobilisasi massa kemudian menjadi sarana untuk memperoleh kekuasaan dengan modus mengamankan hak kelompok tertentu dan mengurangi kecemasan kelompok lainnya. Jacques dengan mengutip Horowitz menjelaskan bahwa kekuasaan memiliki dua pengertian yakni menegaskan status dan menghindari ancaman. Pengertian tersebut biasanya membutuhkan suatu upaya untuk mendominasi lingkungan, menekan perbedaan, serta mencegah dominasi dan tekanan dari pihak lain.⁷

Ketika kekhawatiran kelompok menjadi dasar bagi mobilisasi politik, perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan menjadi satu-satunya tujuan. Mobilisasi mendorong dan mengambil bentuk lain sesuai dengan jejaring tokoh tertentu guna mengungkapkan dan membangun kepentingan-kepentingan pribadi dan klaim-klaim kelompok masyarakat. Ketakutan dan potensi kekerasan yang terbangun sebagai akibat dari sistem politik.

Lebih jauh, terdapat beberapa faktor yang bagi R Tockary perlu diuji secara cermat yaitu komunalisme, nasionalisme berdasarkan etnis, penduduk asli, paradigma klaim kebenaran dalam kegiatan misionaris dan dakwah keagamaan.⁸ Sementara itu, Franz Magnis Suseno seperti dikutip oleh Suprpto mengatakan, konflik etnis dan agama di Indonesia disebabkan oleh latar belakang yang

⁷ Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis...*, hlm. 19

⁸ R. Tockary, *Catatan Singkat Tentang Etnis Agama di Indonesia* dimuat dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003) h. 53

kompleks. Salah satu faktor tersebut adalah akumulasi kebencian dalam masyarakat. Pelbagai stigma atas kelompok lain yang selama ini hanya bergulir sebagai *hiddent transcript* menguat pada momentum yang tepat.⁹

Kerap kali ketakutan kelompok, ketegangan, atau kekesalan-kekesalan bersifat terselubung, sementara bentuk-bentuk tindakan politik paling umum tetap berada pada wilayah “transkrip tersembunyi”.¹⁰ Meski di permukaan tampak harmonis namun hal tersebut sebagai bagian yang menutup “transkrip tersembunyi” tersebut dari kegembiraan, gerutu, kecurigaan dan kebencian yang terpendam dalam emosi-masing-masing individu.

Kebencian individu terus terakumulasi secara sosial sehingga melahirkan kebencian kolektif. Kebencian tersebut menjadi salah satu pemicu tindakan kekerasan masyarakat terhadap kelompok yang mereka anggap menyimpang dengan apa yang mereka pahami. Di samping selama ini, kekerasan etnis belum cukup menekankan kaitan-kaitan antara nasionalisme, lembaga, dan hubungan di antara kelompok-kelompok etnis.¹¹ Penjelasan terkait konflik lebih terfokus pada faktor-faktor munculnya konflik komunal, peran kalangan elit politik, dan legitimasi kelompok.

Dalam hal ini, konflik antara warga Ahmadiyah dan masyarakat Desa Gegerung Lombok Barat di permukaan tampak dipicu oleh hal-hal yang bersifat simplistis seperti sentimen dan kecurigaan warga Gegerung. Namun tanpa diperkuat oleh faktor-faktor sosial-politik yang melibatkan pimpinan formal dan non formal, gerakan massa tidak akan bergerak secara terstruktur dan massif.

Terkait hal tersebut, kerangka instrumental menjelaskan mengapa perbedaan pemahaman keagamaan kadang-kadang menjadi saluran perjuangan politik dan konflik kelompok tertentu. Para pemimpin dan elit politik menggunakan daya tarik emosional untuk

⁹ Suprpto, *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Satu Masjid* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), 37

¹⁰ Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis...*, hlm. 20

¹¹ Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan konflik Etnis di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 17, terAchmad Munjid

menggerakkan dukungan massa dalam perebutan kekuasaan, sumber-sumber daya dan kepentingan pribadi. Baik dari level terbawah seperti di desa maupun pada level nasional. Karena itu kebanyakan ahli menolak argumen bahwa konflik muncul dari semangat identitas kelompok semata.¹² Lewat pendekatan semacam ini, peneliti dapat memusatkan perhatian pada peran elit dalam memobilisasi massa.¹³

C. Peta Sosial-Politik Desa Gegerung

Gegerung merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan satu dari 10 desa yang berada di Kecamatan Lingsar. Desa Gegerung memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar bersuku Sasak. Mayoritas bekerja sebagai petani dan penambang pasir.

Desa Gegerung diketahui memperoleh Surat Keputusan (SK) Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat-NTB pada 1998. Akhirnya Desa Gegerung secara administratif menjadi desa baru yang terpisah dari Desa Griya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat itu, Maskum ditunjuk langsung oleh Bupati Lombok Barat sebagai Kepala Desa Gegerung dengan pertimbangan ia sudah mengabdikan diri sebagai Kepala Dusun sebelum Gegerung berstatus definitif sebagai desa baru di Lombok Barat.¹⁴

Desa Gegerung terdiri dari tujuh dusun antara lain Dusun Jalateng Barat, Dusun Ketapang, Dusun Orong Selatan, Dusun Orong Utara, Dusun Orong Puncak, Dusun Jelateng Timur, Dusun Jelateng Tengah. Pemukiman Jamaat Ahmadiyah terletak di Dusun Ketapang. Di sebelah utara berbatasan dengan sawah dan pemakaman. Sebelah timur berbatasan dengan areal tambang Galian pasir, sebelah selatan dibatasi sungai, dan di barat dibatasi bentang persawahan.

Setelah periode kepemimpinan H. Maskum selaku kepala desa berakhir, dimulailah pemilihan kepala desa

¹² Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis...*, hlm. 19

¹³ Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis...*, hlm. 18

¹⁴ Wawancara, H. Maskum, pada Sabtu, 12 Juni 2019. Pukul 16.00

secara demokratis. Pemilihan kepala desa pada 2001 berjalan lancar tanpa kendala apapun. Tak ada gejolak yang terlalu berarti di tengah masyarakat. Mengingat waktu itu Jemaat Ahmadiyah belum tinggal di desa tersebut. Pemilihan kepala desa pada 2001 dimenangkan oleh Maskum selaku petahana yang kembali terpilih sebagai Kepala Desa Gegerung periode 2001-2006.

Pada 2005, menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Maskum, pemilihan kepala desa yang hendak dilaksanakan pada 2006 sudah mulai memanas. Pada waktu itu kontestan kepala desa mulai diseleksi. Muncul sebanyak tiga kontestan yang berlaga pada pemilihan yang akan dilaksanakan pada awal 2006. Kandidat calon kepala desa yang diloloskan salah satunya adalah petahana, H. Maskum. Dua calon lainnya adalah Sahudin dan Murad.

Saat itu, petahana secara hukum masih diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala desa periode kedua. Setelah mengetahui Maskum kembali maju sebagai calon kepala desa, salah seorang pemuka agama kembali mencalonkan Sahudin, calon kepala desa yang dia usung pada lima tahun lalu. Ia juga turut terlibat secara langsung mengampanyekan Sahudin pada 2001.¹⁵ Meski saat itu Sahudin kalah telak dari petahana.

Sementara itu, dua tahun sebelum konflik meletus pada 2005, Jemaat Ahmadiyah sudah menempati rumah baru di Gegerung setelah mengalami pengusiran dari kampung halamannya di sejumlah kabupaten. Jemaat Ahmadiyah berhasil membeli perumahan yang berada di sekitar Dusun Ketapang, Desa Gegerung.¹⁶ Jemaat Ahmadiyah akhirnya tinggal di perumahan yang terpisah dengan warga Gegerung.

Mendengar kabar adanya pendatang baru di desa Gegerung, Kepala Desa Gegerung menerimanya secara terbuka. Awalnya warga Gegerung tidak mempermasalahkan kedatangan Jemaat Ahmadiyah. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya warga Ahmadiyah dalam

¹⁵ Wawancara, Maskum pada Sabtu, 12 Juni 2019. Pukul 16.00 WITA

¹⁶ Perumahan yang dibeli oleh Jemaat Ahmadiyah merupakan perumahan yang sudah lama mangkrak karena tidak laku. Akhirnya pengusaha perumahan tersebut melelang unit rumah di wilayah Desa Gegerung tersebut.

kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong di masjid dan lingkungan sekitar. Jemaat Ahmadiyah pun merasa nyaman tinggal di pemukiman barunya di Desa Gegerung. Semenjak 2003 Jemaat Ahmadiyah menunaikan sholat Jumat di Masjid Dusun Ketapang bersama warga lainnya.¹⁷

Namun ternyata kehangatan tersebut tak bertahan lama. Dua tahun Jemaat Ahmadiyah tinggal di desa tersebut ternyata tak sepenuhnya kondusif, mulai terdengar suara-suara lain dari Warga Gegerung yang menyebut Ahmadiyah sesat.¹⁸ Sebagai salah satu kandidat calon kepala desa, Sahudin kerap memantau aktivitas warga Ahmadiyah yang kebetulan di sebelah timur pemukiman Jemaat Ahmadiyah terdapat tambang pasir, tempat sebagian warga Gegerung bekerja.

D. Dakwah Provokatif Menjelang Pemilihan Kepala Desa

Akhir 2005 hubungan Jemaat Ahmadiyah dan warga Gegerung mulai memanas. Keretakan hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan warga sekitar berawal dari pengajian yang diampu oleh salah satu tokoh agama di desa tersebut. Pengajian dilaksanakan secara rutin setiap Rabu dan Jumat sore di masjid Dusun Ketapang. Materi pengajian banyak menyinggung keberadaan dan menyesatkan Ahmadiyah. Provokasi lewat pengajian dianggap efektif karena mampu membangkitkan sentimen dan kebencian masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah.¹⁹ Materi pengajian semacam itu mulai disampaikan beberapa bulan menjelang pemilihan kepala Desa Gegerung.

Selain diisi oleh Tuan Guru dari desa setempat, juga mengundang penceramah lain dari Lombok Tengah. Mengingat Tuan Guru tersebut memiliki jamaah yang cukup banyak dari Desa Gegerung. Tak hanya itu, Tuan Guru di Desa Gegerung turun secara langsung dari dusun ke dusun untuk menyampaikan kesesatan ajaran Ahmadiyah.²⁰

¹⁷ Wawancara, Jauzi pada Jumat, 16 Februari 2018. Pukul 14.00 WITA

¹⁸ Wawancara, Maskum Sabtu 13 Juni 2019. Pukul 15.00 WITA

¹⁹ Wawancara, H. Maskum pada 12 Maret 2019, Pukul 16.00 WITA

²⁰ Wawancara, H. Maskum pada 12 Maret 2019 di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Lingsar, Lombok Barat, Pukul 16.00 WITA

(Alm) Tuan guru itu berkali-kali mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah itu sesat dan wajib hukumnya diserang. Dia keliling dari dusun ke dusun menyebarkan informasi bahwa Ahmadiyah harus diusir dari desa ini.²¹

Provokasi dari pintu ke pintu dilakukan selama beberapa bulan. Hal ini diperkuat oleh laporan salah satu NGO di NTB yang menyebut salah seorang tokoh agama gencar melakukan agitasi. Namun ia tak mendalami latar belakang dan motif Tuan Guru tersebut.²² Semakin mendekati pemilihan kepala desa, Tuan Guru yang berasal dari Gegerung itu semakin gencar menyebarkan provokasi. Dari situ, isu terhadap kehadiran Ahmadiyah semakin memanas.

Akibatnya keharmonisan yang telah terbangun sejak kedatangan Jemaat Ahmadiyah pupus seketika. Warga sekitar Gegerung percaya bahwa ajaran Ahmadiyah sesat. Salah seorang warga menjelaskan bahwa informasi yang ia terima dari mulut ke mulut menyebut Jemaat Ahmadiyah menempatkan orang di luar Ahmadiyah seperti binatang yang nakjis. Setiap orang Gegerung yang berkunjung ke rumah Jemaat Ahmadiyah, bekas duduknya mesti disucikan.²³ Informasi bohong semacam ini menyebar dan masyarakat Gegerung meyakini bahwa informasi tersebut benar adanya.

Provokasi terkait menyimpangnya ajaran Jemaat Ahmadiyah terus dilakukan terutama lewat pengajian. Kabarnya, Tuan Guru di desa tersebut merasa khawatir jamaahnya dipengaruhi oleh warga Ahmadiyah. Di samping di tingkat elit sudah lama MUI mengeluarkan fatwa yang menyesatkan Ahmadiyah.²⁴ Kabar bohong tentang ajaran Jemaat Ahmadiyah di tengah sentimen masyarakat desa yang mudah terbakar, menyebabkan gelombang kebencian dan kekerasan meledak.

Mengapa provokasi semacam itu mulai dilakukan menjelang pemilihan kepala desa? Ternyata beakangan diketahui bahwa pemuka agama tersebut berafiliasi

²¹ Wawancara, Maskum pada Sabtu, 12 Juni 2019. Pukul 16.00 WITA

²² Laporan LenSA NTB

²³ Wawancara, Marzuki Warga Desa Gegerung pada 14 Maret 2019 pukul 13.00 WITA

²⁴ Wawancara, Maskum pada Sabtu, 12 Juni 2019. Pukul 16.00 WITA

dengan salah satu kandidat calon kepala desa. Selain memang tokoh agama tersebut sebelumnya tidak sejalan dan kerap berselisih secara lisan maupun fisik dengan kepala desa petahana²⁵ Itu sebabnya pada pemilihan kepala desa Gegerung, pemuka agama mendukung Sahudin sebagai calon kepala desa. Calon petahana, Maskum menceritakan hubungannya dengan salah satu tokoh agama semenjak lama sudah tidak harmonis, bahkan sejak Gegerung berstatus sebagai dusun.²⁶

Calon kepala desa penantang, Sahudin mengakui salah seorang Tuan Guru dari Desa Gegerung dekat dengannya. Menurutnya, Tuan Guru aktif mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan.²⁷ Itu sebabnya Tuan Guru tersebut menyatakan dukungannya terhadapnya dan terlibat aktif dalam kampanye secara langsung maupun lewat pengajian-pengajian di masjid.²⁸ Sahudin sendiri menilai Ahmadiyah tidak diterima oleh masyarakat Gegerung karena ajarannya dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam.²⁹

Sedangkan Maskum selaku petahana merasa dirinya sebagai korban. Sebab pada saat terjadi penyerangan pada akhir 2005 dan Februari 2006, rumahnya turut dikepung warga, dilempari batu dan nyaris dibakar karena dianggap berpihak kepada Ahmadiyah. Ia berusaha menghalangi massa namun tak berhasil.³⁰ Maskum sebagai kepala desa Gegerung waktu itu bertanggungjawab penuh untuk mengendalikan warga. Bahkan sebelum penyerangan terjadi Maskum sempat berkunjung ke rumah warga Ahmadiyah untuk menginformasikan bahwa sejumlah massa dari Desa Gegerung dan Griya hendak menyerbu perumahan milik Jemaat Ahmadiyah.³¹

Alhasil, pada pemilihan kepala desa pada 2006,

²⁵ Wawancara, Maskum pada Sabtu, 12 Juni 2019. Pukul 16.00 WITA

²⁶ Wawancara, Maskum pada Sabtu, 12 Juni 2019. Pukul 16.00 WITA

²⁷ Wawancara, Sahudin pada Senin 13 Juni 2019. Pukul 15.00 WITA

²⁸ Wawancara, Sahudin pada Senin 13 Juni 2019. Pukul 15.00 WITA

²⁹ Wawancara, Sahudin pada Senin 14 Juni 2019. Pukul 15.00 WITA

³⁰ Wawancara, Maskum, pada Sabtu, 12 Juni 2019. Pukul 16.00 WITA

³¹ Wawancara, Jauzi, Sabtu Jumat, 16 Februari 2018. Pukul 14.00

Maskum selaku petahana kalah. Sedangkan Sahudin, sebagai calon yang diusung Tuan Guru berhasil memperoleh suara terbanyak. Sahudin pun menjabat sebagai Kepala Desa Gegerung periode 2006-2010. Tak lama setelah itu, Tuan Guru yang mendukungnya ia tunjuk sebagai penghulu desa. Kepala desa baru lalu menyusun jadwal ceramah keliling bagi Tuan Guru ke tiap dusun di Desa Gegerung.³²

Sementara itu, warga Ahmadiyah hingga saat ini tidak mengetahui persoalan di balik kekerasan yang menimpanya. Jemaat Ahmadiyah tak mengetahui secara pasti latar belakang penyerangan padahal sebelumnya mereka sudah beradaptasi dengan baik.³³ Jemaat Ahmadiyah mengaku enggan mengetahui soal politik. Hal itu disebabkan karena Jemaat Ahmadiyah waktu itu sebagai pendatang baru dan merasa tak berhak mengetahui dinamika politik di desa tersebut. Warga Ahmadiyah pun tidak dilibatkan dalam pemilihan kepala desa.³⁴ Posisi Jemaat Ahmadiyah relatif pasif dalam konteks politik sedangkan di tataran sosial ia terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong.

E. Aktor Politik Di Balik Konflik

Bagaimana bisa mobilisasi massa begitu efektif dalam kasus ini? Pada titik inilah instrumentalisasi konflik yang digerakkan oleh aktor-aktor politik terjadi. Para pemimpin dan elit politik yang memainkan emosi masyarakat sekaligus mampu mendulang dukungan massa dalam perebutan kekuasaan, sumber-sumber daya dan kepentingan pribadi.³⁵ Baik dari level terbawah seperti di desa maupun pada level nasional.

Bergabungnya kepentingan tokoh agama dengan salah satu calon Kepala Desa Gegerung untuk menumbangkan petahana menyebabkan isu keberadaan Ahmadiyah dimanfaatkan. Imbasnya, sentimen masyarakat tersulut dan kekerasan terjadi. Salah seorang

³² Wawancara, Sahudin, 14 Juni 2019. Pukul 15.00 WITA

³³ Wawancara, Jauzi Sabtu Jumat, 16 Februari 2018. Pukul 14.00 WITA

³⁴ Wawancara, Jauzi, Warga Ahmadiyah, Jumat, 16 Februari 2018. Pukul 14.00 WITA

³⁵ Suprpto, Semerbak Dupa di Pulau Seribu Satu Masjid, hlm. 18

Tuan Guru berhasil menekankan perbedaan antara Jemaat Ahmadiyah dengan warga setempat. Sedangkan salah satu kandidat kepala desa melakukan memobilisasi masa sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan yang dicitrakan untuk mengurangi kecemasan masyarakat Desa Gegerung.

Sebagai desa baru, Gegerung memiliki elit-elit baru yang bergerak secara politis. Para aktor politik cenderung memiliki kesempatan yang sangat luas dalam melakukan aktivitas maupun manuver politik.³⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari peranan elit-elit politik desa yang lincah memainkan isu-isu perbedaan keyakinan sebagai komoditas untuk meraup simpati masyarakat.

Afiliasi antara elit-elit desa sebetulnya sudah menjadi kecenderungan desentralisasi pasca orde baru. Desentralisasi memberi warna lain dalam proses demokratisasi di Indonesia. Keragaman aktor politik ini juga terjadi di arena politik daerah di tingkat provinsi, kabupaten bahkan desa. Aktor-aktor politik di daerah berhasil memainkan perannya yang pragmatis dan dengan pelbagai siasat manipulatif sehingga dapat membelokkan tujuan desentralisasi dan demokrasi itu sendiri.

Calon kepala Desa Gegerung sebagai kelompok elit-politik berperan memainkan identitas serta memanfaatkan sentimen masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Lewat kondisi tersebut elit politik melakukan mobilisasi massa yang mensyaratkan perpaduan antara kepentingan politik, identitas kelompok dan klaim-klaim “kesesatan” Ahmadiyah. Konflik dan kekerasan terjadi antar komunitas atau aliran dalam internal agama melibatkan aktor yang variatif.

Cornelis Lay membagi aktor tersebut menjadi empat macam. Pertama, ormas dalam komunitas agama yang sama. Kedua, Kekerasan yang melibatkan negara yang bertindak atas nama agama resmi dan merepresi aliran (yang dianggap) “menyimpang” dalam satu agama. Ketiga, Kekerasan yang melibatkan komunitas dari agama yang sama. Keempat, kekerasan yang melibatkan institusi pemegang otoritas agama atas warga dari

³⁶ R. Siti ZuhZuhro (ed), *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 11-12

komunitas yang sama.³⁷

Pola yang terakhir terjadi dalam kasus Ahmadiyah di Lombok Barat. Perbedaan pemahaman keagamaan sebagai saluran perjuangan politik salah satu oknum calon kepala desa. Tak ayal, perbedaan berubah menjadi kekacauan agar stabilitas desa terganggu sembari menyandarkan kelompok yang berbeda tersebut kepada pihak yang ingin dijatuhkan. Kalangan elit desa dan tuan guru berperan besar di tengah masyarakat.

Tokoh agama secara umum sudah lama dilihat sebagai pemicu konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Salah satunya Tuan Guru Amin Djamaluddin yang gencar melakukan serangan terhadap Ahmadiyah lewat pelbagai media salah satunya lewat buku “Ahmadiyah Membajak Al-Qur’an” yang didistribusikan oleh MUI NTB ke sejumlah pondok pesantren. Terlebih Amin aktif mengkampanyekan gerakan anti Ahmadiyah di Lombok.³⁸

Tuan Guru sebagai elit berhasil membangkitkan sentimen identitas dengan mengaskan perbedaan sedangkan di sisi lain ia memiliki kepentingan tertentu terhadap kuasa desa lewat kontestasi pemilihan Kepala Desa Gegerung. Demokrasi desa dimanfaatkan sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi elit di tengah masyarakat desa. Tuan Guru dan salah seorang kandidat kepala desa memegang wacana dan memberikan tekanan terhadap Jemaat Ahmadiyah agar keluar dari Desa Gegerung.

Tipikalisasi Tuan Guru macam ini dalam konteks praksis kebebasan beragama di Lombok, lebih dominan memainkan peran sebagai penyalur wacana-wacana anti pluralisme yang berpotensi mencoreng cita-cita kebebasan dan citra keragaman antar sesama muslim.³⁹ Tuan Guru akhirnya menjadi aktor yang menjembatani

³⁷ Cornelis Lay, *Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume, 13, Nomer 1, Juli 2009, Hal. 4

³⁸ Nurhikmah, *Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing: Narasi Identitas dalam Kekerasan*, hlm. 75

³⁹Fawaizul Umam, *Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok*, Jurnal Ulumuna, vol. XIII, no. 2 Desember 2009, hlm. 439

disintegrasikan antar sesama Muslim seperti apa yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Gegerung.

Sementara itu, adanya fatwa MUI dan peraturan diskriminatif bupati Lombok Barat tidak berhubungan secara langsung dalam konflik dan kekerasan. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebut kekerasan bermuara pada fatwa MUI dan negara yang bersifat tendensius dan mendorong terjadinya kekerasan.⁴⁰ Faktor regulatif yang bersifat makro tersebut hanya sebagai legitimasi yang bersifat semu.

Dalam kasus kekerasan di Desa Gegerung, tokoh agama, kandidat kepala desa dan warga setempat tak mengetahui adanya SK dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yang melarang kehadiran Ahmadiyah. Juga tidak mengetahui fatwa MUI 1980 dan belakangan muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 2008 yang melarang dakwah Ahmadiyah.⁴¹

Lemahnya pemahaman terkait regulasi⁴² menyebabkan tokoh agama dan masyarakat luas tak menghiraukan SK Pemda Lombok Barat maupun fatwa MUI. Sehingga di sini variabel politik sebetulnya lebih berkontribusi besar terhadap lahirnya konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Gegerung.

F. Budaya Politik Dan Kekerasan Di Desa

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba memandang budaya politik sebagai peran individu terhadap sistem dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik.

⁴⁰ Abdul Gaffar, Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara..., hlm. 49

⁴¹Aturan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomer 35/2001. Kendati demikian, surat keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut ditentang oleh Komnas HAM, Zumrotin yang menyatakan bahwa SK tersebut menunjukkan adanya kekacauan regulasi. SK tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Aturan tersebut dikeluarkan setelah pemda melakukan koordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama Lombok Barat. Selain itu terdapat fatwa kesesatan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh MUI.

⁴² Abdul Jamil Wahab dan Fakhruddin, Menakar Efektivitas SKB tentang Ahmadiyah dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur, Jurnal Harmoni vol. 17, Nomer 2, hlm. 457

Budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial dalam sistem politik. Sikap positif atau negatif seseorang terhadap sistem politik tergantung dari corak orientasi budaya politik yang digunakannya.⁴³

Budaya politik berkaitan erat dengan pandangan dan sikap individu dalam masyarakat sebagai sesama warga negara. Sikap atau pandangan ini berkaitan dengan rasa percaya diri serta permusuhan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain atau antar golongan dalam masyarakat. Perasaan dan kecurigaan merupakan cerminan budaya politik tampak dalam pandangan dan sikap seseorang terhadap pengelompokan di sekitarnya. Dengan kata lain konflik antar kelompok atau golongan sosial merupakan ciri aktual yang dapat mewarnai budaya politik di dalam masyarakat.

Pada titik ini pemerintahan desa yang seharusnya menegaskan kesetaraan dan menghindari ancaman malah berlaku sebaliknya. Para kontestan nyatanya berupaya memunculkan perbedaan, serta membiarkan dominasi dan tekanan dari pihak lain. Kehadiran Jemaat Ahmadiyah menjadi dasar mobilisasi politik dan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai satu-satunya tujuan. Mobilisasi tersebut juga mendorong dan mengambil bentuk lain sesuai dengan jejaring tokoh tertentu guna mengungkapkan dan membangun kepentingan-kepentingan pribadi.

Meski pemilihan kepala desa di Gegerung dilaksanakan secara demokratis, namun pada kenyataannya tindakan para kontestan menyidrai demokrasi sendiri. Salah satu hal yang merusak demokrasi menurut Robert A. Dahl adalah memaksa pemilih dengan motif dan unsur-unsur kekerasan terhadap pihak lain. Padahal dalam demokrasi, setiap masyarakat bebas mengespresikan diri.⁴⁴ Kekerasan-kekerasan terjadi dalam rentan waktu yang cukup panjang dan melibatkan pelbagai pihak. Tidak hanya warga setempat, tetapi juga peran tokoh agama dan instrumen-instrumen pemerintahan di tingkat

⁴³ Suprpto, *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Satu Masjid*, hlm. 18

⁴⁴ Masykuri Abdillah dkk, *Konflik Komunal di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 2003), hlm. 173

kabupaten.⁴⁵

Itu artinya, perkembangan budaya politik suatu masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat dipenuhi oleh orientasi antar nilai yang memungkinkan timbulnya kontak-kontak di antara budaya politik suatu kelompok atau golongan disebut sebagai subbudaya politik, yang pada dasarnya merupakan proses terjadinya pengembangan budaya. Keserasian antara struktur budaya dan struktur politik menunjukkan tingkat keserasian budaya politik masyarakat.⁴⁶ Di Gegerung, struktur budaya demokratis sebagai desa baru belum terbentuk sehingga kontestasi politik tidak stabil.

Sementara itu, kebebasan beragama secara regulatif, tak sepenuhnya mampu menjamin kebebasan beragama di tingkat terbawah karena terdapat kompleksitas persoalan lokal yang lebih potensial. Dalam kasus Ahmadiyah di Lombok Barat, persoalan politik desa yang relatif tidak stabil menjadi pemicu terhambatnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Politik desa yang dilaksanakan secara demokratis-prosedural malah berdampak negatif terhadap kehadiran minoritas dan kebebasan beragama.

Mengingat kebebasan beragama secara universal dijamin lewat pelbagai prinsip-prinsip dasar namun kebebasan beragama bukanlah nilai yang otonom dan berdiri sendiri. Kebebasan beragama terkait dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang menyangkut sejumlah pihak instansi seperti negara, kelompok dan individu serta kepentingan kekuasaan.⁴⁷ Salah satunya kekuasaan di level terbawah seperti di

⁴⁵ Ternyata pemicu konflik tak sepenuhnya berangkat dari apa yang telah disimpulkan oleh sejumlah peneliti yang berhubungan dengan tafsir keagamaan maupun regulasi yang bersifat makro. Terdapat variabel lain yang juga berkontribusi terhadap konflik dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah.

⁴⁶ R. Siti Zuhro, dkk, *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), Hlm. 33-34

⁴⁷ Lihat Muhamad Ali dalam Elza Peldi Taher (Ed), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009), hlm. 314

desa.

Di satu sisi intoleransi politik terhadap Jemaat Ahmadiyah terjadi karena adanya pengkategorian berdasarkan standar-standar keagamaan tertentu, serta pendidikan, kontak atau hubungan kelompok masyarakat juga mempengaruhi.⁴⁸ Hubungan antara tokoh agama dan elit politik desa sebagai unsur kuat yang mempengaruhi intoleransi politik di Desa Gegerung. Otoritas tokoh agama yang kuat di tengah masyarakat mempermudah mobilisasi massa dan akibat sentimen anti Ahmadiyah.

Kekerasan berbasis doktrin agama dan aliran tertentu menyimpan kandungan legitimasi teologis yang tak mudah didialogkan. Fenomena kekerasan jenis ini memiliki jalinan dan keterkaitan entitas dengan pelbagai macam faktor lain seperti politik⁴⁹ dan ekonomi. Namun karena pelbagai kasus kekerasan kerap dilihat secara simplistik akhirnya konflik atas nama agama dinilai disebabkan semata oleh persoalan perbedaan keyakinan, regulasi pemerintah dan pengaruh identitas masyarakat. Padahal di balik itu terdapat variabel yang kerap tersembunyi.

Pada titik itulah Jemaat Ahmadiyah berada dalam lingkaran kekerasan. Simbol-simbol keagamaan menjadi semacam representasi sosial yang bertaut erat dengan sifat komunal masyarakat. Lewat simbol agama tersebut komunalitas sosial terjalin kuat. Ketika simbol ini dinilai dilecehkan maka kekerasan yang kerap terjadi di Indonesia ditengarai sebagai pemicu utamanya.⁵⁰ Begitu halnya di Desa Gegerung, masyarakat memiliki ikatan persaudaraan dan emosional yang kuat sehingga begitu

⁴⁸Persepsi Ancaman Sebagai Prediktor Intoleransi Politik Terhadap Jemaat Ahmadiyah Terhadap Jamaah NW Pancor Lombok Timur, Makalah Prosiding Seminar Nasional Psikologi Indigenius Indonesia, 2018 (tidak diterbitkan), Hlm. 628

⁴⁹Ayub Mursalin, Bakhtiar Hasan, Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media 2005-2011, Jurnal Kontekstualita, Vol. 26, No.1, 2011, hlm. 104

⁵⁰Ayub Mursalin, Bakhtiar Hasan, Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media 2005-2011, Jurnal Kontekstualita, Vol. 26, No.1, 2011, hlm. 79

identitas keagamaannya diusik akan dengan sangat mudah berubah menjadi energi negatif. Terutama dalam bentuk kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Sedangkan selama terjadi kekerasan, Jemaat Ahmadiyah di Gegerung tak melakukan perlawanan. Mereka memilih lari keluar dari desa. Begitu situasi mencekam, semua rumah dirusak dan dibakar Jemaat Ahmadiyah terpaksa melarikan diri lewat sawah sebelah selatan Desa Gegerung, menyeberangi sungai dekat desa Griya.⁵¹ Dalam beberapa kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, tidak pernah terjadi benturan fisik secara langsung karena Jemaat Ahmadiyah memilih berlaku pasif. Mereka memilih bertahan tanpa perlawanan atas kekerasan warga yang terjadi.⁵²

G. Kesimpulan

Konflik Ahmadiyah di Gegerung menjadi aktual salah satunya karena adanya instrumentasi yang dimainkan oleh aktor politik dalam suksesi pemilihan umum baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun dalam skala nasional. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang menjelaskan keterkaitan antara akumulasi kebencian kelompok masyarakat dengan dorongan untuk bertindak vandal terhadap kelompok lain

Pola konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah memang kompleks. Di balik kompleksitas tersebut, terdapat pemicu yakni keterlibatan para aktor politik dalam proses mobilisasi massa. Politik desa yang berada dalam unit terbawah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Aktor-aktor politik selain punya modal finansial juga menguasai wacana publik. Para jemaat Ahmadiyah yang notabene sebagai pendatang baru di tempat tersebut tidak mengetahui agenda apa di balik penyerangan warga Gegerung. Padahal sebelumnya interaksi dan komunikasi antara Ahmadiyah dan warga sekitar berlangsung hangat.

Kehadiran kelompok Ahmadiyah di Desa

⁵¹ Wawancara, Jauzi, Warga Ahmadiyah Jumat, 16 Februari 2018. Pukul 14.00 WITA

⁵² Abdul Gaffar, Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB, *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 3no. 2 Oktober 2013, hlm. 40

Gegerung dimanfaatkan oleh elit politik desa untuk meraup suaranya. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan keberadaan tokoh agama di desa tersebut. Salah satu kontestan calon kepala desa memiliki kepentingan untuk menumbangkan petahana dan kepentingan tersebut setali dengan keinginan tokoh agama.

Perbedaannya, calon kepala desa bertujuan menjadi orang nomer satu di desa sedangkan tokoh agama memiliki motif personal dengan petahana. Bertemunya kepentingan untuk menumbangkan petahana yang memiliki kekuatan politik menyebabkan arus mobilisasi massa menyandarkan seluruh persoalan kepada petahana.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang menghubungkan antara konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Desa Gegerung Lombok Barat dengan keputusan SKB Tiga Menteri dan SK Bupati tidak sepenuhnya mempengaruhi konflik Ahmadiyah di Lombok Barat. Aturan yang dinilai menyudutkan kelompok Ahmadiyah tersebut tak sepenuhnya diketahui oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Gegerung. Politik pada level makro tidak secara langsung menyentuh watak dan perilaku masyarakat. Sedangkan di level mikro, aktor-aktor desa bergerak secara langsung memobilisasi masyarakat untuk mengusir Jemaat Ahmadiyah.

H. Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Konflik Komunal di Indonesia*. Jakarta: Inis, 2003.
- Arqi, M Amin, Tutu Chusniyah, Aji Bagus Priyambodo. *Persepsi Ancaman Sebagai Prediktor Intoleransi Politik Terhadap Jemaat Ahmadiyah Pada Jamaah NW Pancor Lombok Timur*, Makalah Prosiding Seminar Nasional Psikologi Indigenius Indonesia. Universitas Negeri Malang, 27-08-2018 (tidak diterbitkan)
- Bertrand, Jacques. *Nasionalisme dan konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2012. Ter. Achmad Munjid
- Gaffar, Abdul. *Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya*

- Jawa Timur dan Lombok NTB. *Jurnal Sosiologi Islam*. Vol. 3no. 2 Oktober 2013
- Lay, Cornelis. *Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Volume. 13. Nomer 1. Juli 2009.
- Nurhikmah. *Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing: Narasi Identitas dalam Kekerasan JAI di Lombok*. Yogyakarta: Tesis Universitas Sanata Dharma, 2013.
- Mursalin, Ayub dan Bakhtiar Hasan. *Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media 2005-2011*. *Jurnal Kontekstualita*. Vol. 26, No.1, 2011
- Suprpto. *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Satu Masjid*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2013.
- Taher, Elza Peldi (Ed). *Merayakan Kebebsan Beragama: Bungan Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.
- Tockary, R. *Catatan Singkat Tentang Etnis Agama di Indonesia dimuat dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Umam, Fawaizul. *Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok*, *Jurnal Ulumuna*, vol. XIII, no. 2 Desember 2009.
- Wahab, Abdul Jamil dan Fakhruddin. *Menakar Efektivitas SKB tentang Ahmadiyah dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur*. *Jurnal Harmoni* vol. 17, Nomer 2.
- Zuhro, R. Siti, *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak, 2009.
- _____, *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Zulkarnaen, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah*. Yokyakarta: LkiS,

2002

Laporan Advokasi Lembaga Studi Kemanusiaan (LENSA) NTB
2010

H. Maskum, Kepala Desa Gegerung Periode 2001-2006

Jauzi, Jemaat Ahmadiyah Lombok

Sahudin, Kepala Desa Gegerung Periode 2006-2011

Ahmad Saleh, Jemaat Ahmadiyah Lombok

Marzuki, Warga Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Lombok
Barat